

**ANALISIS PEMETAAN KONFLIK PEMBANGUNAN
JALAN TOL PADANG-PEKANBARU
(STUDI KASUS RUAS PADANG-SICINCIN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



Oleh:

RIRI SAPITRI

1710832009

Pembimbing:

- 1. Dewi Anggraini, S.IP, M.Si**
- 2. Mhd Fajri, S.IP, MA**

JURUSAN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

2021

ABSTRAK

RIRI SAPITRI, 1710832009. Skripsi S1. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Judul Skripsi “Analisis Pemetaan Konflik Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru (Studi Kasus Ruas Padang-Sicincin). Dibimbing Oleh: Dewi Anggraini, S.IP, M.Si dan Mhd Fajri, S.IP, MA.

Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru Ruas Padang-Sicincin merupakan pembangunan untuk kepentingan umum dan termasuk dalam proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proses pembangunan jalan tol ini mengalami kendala dalam hal pembebasan lahan karena terjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah mengenai ganti rugi dan penetapan trase jalan tol yang akan berdampak kepada lahan produktif, permukiman masyarakat, dan tanah ulayat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peta konflik yang meliputi kronologis konflik, penyebab konflik, dan penyelesaian konflik dalam pembangunan jalan tol ruas Padang-Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Untuk menganalisis fokus kajian dalam penelitian ini menggunakan teori konflik menurut Ralf Dahrendorf dan Simon Fisher. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik disebabkan oleh beberapa faktor: *Pertama*, ganti rugi lahan ditetapkan secara sepihak; *Kedua*, kurang maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat setempat; *Ketiga*, ketidakpuasan masyarakat dengan nilai ganti rugi yang ditetapkan; *Keempat*, tidak adanya standar yang jelas dalam penghitungan ganti rugi; *Kelima*, ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah; *Keenam*, masyarakat beranggapan jalan tol tidak berdampak terhadap peningkatan ekonomi dan kelangsungan hidup mereka; *Ketujuh*, minimnya informasi yang disampaikan mengenai proses pembebasan lahan; *Kedelapan*, kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara jalan tol dengan pihak-pihak yang bersangkutan di daerah setempat, dan; *Kesembilan*, terancam hilangnya identitas kepemilikan hak atas tanah ulayat. Upaya penyelesaian konflik dilakukan dengan cara: *Pertama*, litigasi yaitu pengadilan, dan; *Kedua*, non litigasi yaitu negosiasi, memfasilitasi dialog, mediasi, pencari fakta, dan kompensasi.

Kata kunci: Konflik, Pembangunan, Jalan Tol, Musyawarah

ABSTRACT

Riri Sapitri, 1710832009. Thesis Bachelor, Political Science Department, Faculty Of Social Science And Political Science, Andalas University. Thesis Title “Conflict Mapping Analysis of The Development of The Padang-Pekanbaru’s Toll Road (Case study of Padang-Sicincin)”. Guided by Dewi Anggraini, S.IP, M.Si and Mhd. Fajri, S.IP, MA.

The construction of the Padang-Pekanbaru toll road for the Padang-Sicincin ring section is a development for the public interest. It is included in a national strategic project based on Presidential Regulation Number 58 of 2017 concerning the Acceleration of Implementation of National Strategic Projects. The toll road construction process is experiencing obstacles in terms of land acquisition due to conflicts between the community and the government regarding compensation and the determination of toll road alignments, impacting productive land, community settlements, and customary land. This study aims to explain the conflict map, which includes the chronology of conflict, causes of conflict, and conflict resolution in constructing the Padang-Sicincin toll road in Padang Pariaman Regency, West Sumatra. The research approach used in this research is a qualitative approach with a case study method. The study's focus in this study uses conflict theory, according to Ralf Dahrendorf and Simon Fisher. The results showed that several factors caused the conflict: *First*, land compensation was determined unilaterally; *Second*, the lack of socialization to the local community; *Third*, community dissatisfaction with the stipulated compensation value; *Fourth*, there is no clear standard in calculating compensation; *Fifth*, public distrust of the government; *Sixth*, people think that toll roads will not have an impact on improving their economy and survival; *Seventh*, the lack of information conveyed about the land acquisition process; *Eighth*, lack of coordination between toll road operators and parties concerned in the local area, and; *Ninth*, threatened with loss of identity of ownership of customary land rights. *First*, conflict resolution efforts are carried out by litigation, namely court, and; *Second*, non-litigation, namely negotiation, facilitating dialogue, mediation, fact-finding, and compensation.

Keywords : Conflict, Development, Toll Road, Deliberation